

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMANFAATAN HAK GUNA USAHA
PERKEBUNAN DI KABUPATEN AGAM**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:



MU'AWIYA ALTY

2210112230

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA

ALAM

(PK VIII)

Pembimbing:

**Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M.
Darnis, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 23/PKVIII/IV/2026

	No. Alumni Universitas	Mu'awiya Alty	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/02 April 2004 b. Nama Orang Tua : Albert, Zuryati c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam e. NIM : 2210112230	f. Tanggal Lulus : 24 Agustus 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan i. IPK : 3,79 j. Alamat : Jorong Ampang Gadang, Kenagarian Ampang Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam	

PENGAWASAN PEMANFAATAN HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN AGAM

(Mu'awiya Alty, 2210112230, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 Halaman, 2026)

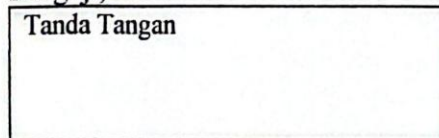
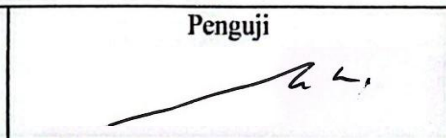
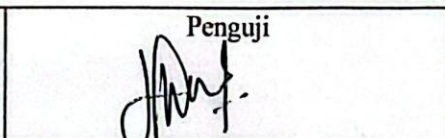
ABSTRAK

Hak Guna Usaha merupakan instrumen hukum agraria yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPA. Penelitian ini mengkaji: (1) pemanfaatan HGU untuk perkebunan di Kabupaten Agam; (2) pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pertanahan; dan (3) penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan HGU. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Kabupaten Agam, PT Inang Sari, dan PT Mutiara Agam, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Mutiara Agam memanfaatkan HGU sesuai peruntukan dengan tingkat pemanfaatan sekitar 6.600 dari 8.625 hektare, sedangkan PT Inang Sari melakukan alih komoditas dari kakao ke kelapa sawit tanpa izin resmi sejak 1998 serta hanya memanfaatkan sekitar 453 dari 1.494,25 hektare lahan, melanggar Pasal 6 UUPA, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dan Pasal 27 huruf b PP Nomor 18 Tahun 2021. Pengawasan dilaksanakan melalui laporan rutin dan kunjungan lapangan, namun belum efektif karena tidak terjadwal, tidak terdokumentasi secara tertulis, dan minim koordinasi antarinstansi. Sanksi yang diterapkan hanya berupa pemblokiran administratif atas proses perpanjangan HGU, tanpa ada pencabutan hak maupun teguran tertulis resmi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan penegakan hukum bukan terletak pada substansi regulasi, melainkan pada komponen struktur dan budaya hukum dalam sistem pengelolaan HGU perkebunan di Kabupaten Agam.

Kata Kunci: *Hak Guna Usaha, Perkebunan, Pengawasan.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 24 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji	Penguji
		
Mu'awiya Alty	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Sucy Delyarahmi., S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara : **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Mu'awiya Alty	No. Alumni Faculty
	a. Place/ Date of Birth : Bukittinggi / April 2nd 2004 b. Parent Name : Albert, Zuryati c. Faculty : Law d. Concentration : Agrarian Law and Natural Resources e. NIM : 2210112230	f. Graduation Date : August 26th, 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length Of Study : 4 Years 0 Months i. GPA : 3,79 j. Address : Jorong Ampang Gadang, Kenagarian Ampang Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam	

SUPERVISION OF THE UTILIZATION OF PLANTATION BUSINESS RIGHTS IN AGAM REGENCY

(Mu'awiya Alty, 2210112230, Specialization Program in Agrarian Law and Natural Resources (PK VIII), Faculty of Law, Andalas University, 97 Pages, 2026)

ABSTRACT

The Right to Use for Business (HGU) is an agrarian legal instrument that grants business operators the authority to utilize state-owned land for a specified period, as stipulated in Article 28 of the Agrarian Law (UUPA). This study examines: (1) the utilization of HGU for plantations in Agam Regency; (2) the implementation of supervision by the Land Office; and (3) the imposition of administrative sanctions for violations of HGU utilization. The research method used was an empirical legal approach through interviews with the Agam Regency Land Office, the Agam Regency Agriculture Office, PT Inang Sari, and PT Mutiara Agam, as well as a literature review. The research findings indicate that PT Mutiara Agam utilizes its HGU in accordance with its designated purpose, with a utilization rate of approximately 6,600 out of 8,625 hectares, whereas PT Inang Sari has been switching its crop from cocoa to oil palm without official permission since 1998 and utilizes only about 453 out of 1,494.25 hectares of land, thereby violating Article 6 of the Land Law (UUPA), Article 16 (1) of Law No. 39 of 2014, and Article 27 (b) of Government Regulation No. 18 of 2021. Oversight is carried out through routine reports and field visits; however, it has not been effective because it is unscheduled, not documented in writing, and lacks inter-agency coordination. The sanctions imposed consist only of administrative blocks on the HGU renewal process, without any revocation of rights or official written warnings. This study concludes that the weakness in law enforcement lies not in the substance of the regulations, but rather in the structural and cultural components of the legal system governing HGU management for plantations in Agam Regency.

Keywords: *Right to Cultivate, Plantations, Oversight.*

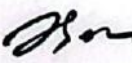
This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 24th, 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Mu'awiya Alty	Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.	Sucy Delyarahmi., S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: